

Pengaruh *Equity Sensitivity* dan *Ethical Sensitivity* terhadap Perilaku Etis Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pusat

Raniah Nurjannah¹, Asropi²
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2}
raniahnur99@gmail.com¹

Abstract

This research is motivated by various ethical issues faced by auditors when carrying out their duties that are vulnerable to trading their integrity on the results of the examination of financial statements to certain individuals. In an effort to understand these issues, this study aims to identify several factors that have the potential to influence the ethical behavior of auditors, namely equity sensitivity and ethical sensitivity, especially at the Supreme Audit Institution of the Republic of Indonesia (BPK RI). The research was conducted by distributing questionnaires totaling 100 auditors at the Central BPK RI. The method used is quantitative with multiple linear regression data processing techniques. The results of this study indicate that there is an effect of equity sensitivity on the ethical behavior of auditors, while ethical sensitivity has no effect on the ethical behavior of auditors. The results of this study are expected to contribute both theoretically and practically for various parties.

Keywords: *Equity Sensitivity; Ethical Sensitivity; Auditors Ethical Behavior*

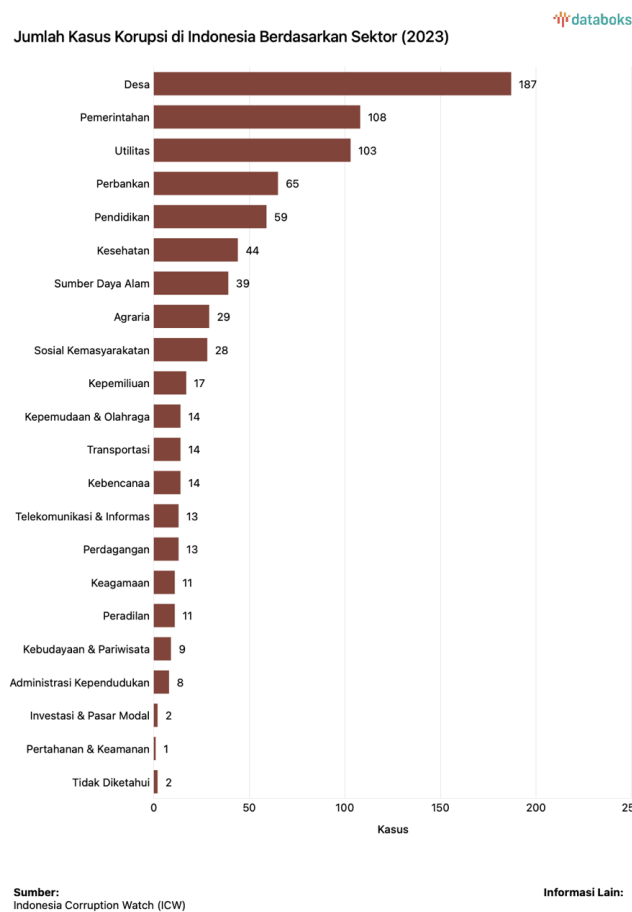
Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai isu etika yang dihadapi pemeriksa ketika menjalankan tugasnya yang rentan memperjualbelikan integritasnya terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pada oknum tertentu. Dalam upaya memahami isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi perilaku etis pemeriksa, yakni *equity sensitivity* dan *ethical sensitivity*, khususnya pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Pusat sebagai *Supreme Audit Institution*. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berjumlah 100 orang pemeriksa pada BPK RI Pusat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengolahan data regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *equity sensitivity* terhadap perilaku etis pemeriksa, sedangkan *ethical sensitivity* tidak berpengaruh terhadap perilaku etis pemeriksa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak.

Kata kunci: *Equity Sensitivity; Ethical Sensitivity; Perilaku Etis Pemeriksa*

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi permasalahan yang terus mengakar di berbagai negara karena dampaknya yang sangat merugikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk memperburuk ketimpangan sosial, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan memperparah permasalahan lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Suyatmiko (2021). Berdasarkan hasil temuan oleh *Transparency International* pada tahun 2024, jumlah skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yakni sebesar 37 dari skala 0-100. Hal ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-99 dari 180 negara, masih sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk.



Gambar 1. Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Sektor (2023)
Sumber: Databoks dari ICW, 2024

Berdasarkan gambar di atas, sektor yang menduduki tingkat korupsi paling tinggi ialah desa dan pemerintahan. Tingginya tingkat korupsi di lingkup pemerintahan tersebut menggambarkan buruknya pengelolaan pemerintahan di suatu negara karena penyimpangan peran pemerintah dalam mengatur sumber daya publik, dalam hal ini menurut Prasetyawati (2023) dana dari masyarakat untuk kesejahteraan bersama dikorupsi oleh oknum yang seharusnya mengelola sumber daya tersebut. Menurut Kumombong (2022), dalam hal mengusahakan penumpasan kasus korupsi di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan peran dari lembaga atau badan pemeriksa keuangan guna membendung penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi pemerintah.

Dalam organisasi pemerintahan, Indonesia memiliki lembaga audit independen bernama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kedudukan lembaga ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pemeriksa pada BPK tidak hanya bertugas memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mencegah praktik yang berpotensi merugikan negara. Namun, menurut Umar dan Purba (2021) korupsi sering kali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya integritas auditor, yang memungkinkan penyimpangan dalam pelaporan keuangan atau manipulasi data yang tetap tersembunyi.

Pemeriksa yang bekerja tidak sesuai dengan kode etiknya dapat melakukan tindak korupsi seperti menerima suap dari entitas yang diaudit guna memperjual-belikan opini hasil temuannya yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana WTP merupakan predikat tertinggi dari BPK yang dapat diberikan dalam laporan keuangan auditi atau entitas yang diaudit sehingga entitas tersebut memiliki citra yang positif terbebas dari korupsi. Namun, seringkali hasil temuan yang ada di lapangan berbeda dengan apa yang dituliskan oleh pemeriksa dalam laporan keuangan hasil audit. Berikut beberapa kasus yang telah terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang melibatkan pimpinan maupun pemeriksa BPK sebagai tersangka kasus korupsi.

Tabel 1. Kasus Korupsi yang Melibatkan Pemeriksa BPK

Tahun	Auditi	Modus Operandi	Sumber
2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pemeriksa BPK menerima suap dan memanipulasi temuan dugaan penggelembungan anggaran atau <i>mark-up</i> di dalam laporan keuangan Pemprov Sulsel	CNN (2022)
2021	Pemerintah Kabupaten Bogor	Pemeriksa BPK menerima suap untuk memberikan opini WTP dalam laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021	KPK dan CNBC (2022)
2022	Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada Dinas Kesehatan (RSUD dan Puskesmas)	Pemeriksa BPK melakukan pemerasan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan meminta kepada 45 Puskesmas masing-masing Rp20 juta dan Rp100 juta kepada Rumah Sakit Umum Daerah untuk memuluskan penilaian keuangan di Kabupaten Bekasi.	Media Indonesia dan TVRI (2022)
2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pimpinan BPK menerima suap dan membantu pemeriksaan pekerjaan <i>Base Tranceiver Station (BTS)</i> 4G yang dilaksanakan oleh BAKTI Kominfo supaya mendapatkan hasil WTP dan tidak menemukan kerugian negara dalam pelaksanaan proyeknya.	Tempo (2023), CNN , dan Antara News (2024)
	Pemerintah Kabupaten Sorong	Pemeriksa BPK menerima suap untuk pengondisian temuan hasil audit BPK di Pemkab Sorong.	Detik dan Tempo (2024)
2024	Kementerian ESDM	Pemeriksa BPK terlibat korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM	Kompas (2024)
	Kementerian Pertanian	Pemeriksa BPK menjual-belikan opini WTP laporan keuangan Menteri Pertanian	CNBC dan Suara (2024)
	PT Waskita Karya	Pemeriksa BPK menerima suap dan memalsukan laporan audit pengalokasian dana tidak wajar dalam proyek pembangunan Jalan Tol MBZ	Kompas (2024)

Diolah dari berbagai sumber

Hal ini juga didukung oleh data dari ICW (2024) yang membuktikan setidaknya ada tujuh kasus korupsi selama 2017 hingga 2023 yang melibatkan 13 personil BPK. Selain itu, berdasarkan data dari CNN (2024) bahwa terdapat 7 pimpinan dan anggota BPK yang terjerat kasus korupsi sepanjang 5 tahun terakhir. Dari berbagai bukti yang ada menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan perilaku etis pemeriksa yang melanggar kode etik pemeriksa BPK. Seperti yang tercantum dalam Peraturan BPK No. 4 tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dimana dalam pasal 6 disebutkan bahwa tiap pemeriksa diharuskan bersikap jujur, objektif, dan konsisten sehingga pemeriksa tidak diperbolehkan menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya dari entitas yang diaudit.

Menurut Sekartaji (2020) bahwa kecenderungan seorang individu untuk berbuat perlakuan etis maupun tidak etis dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni terletak pada kepribadian moral individu tersebut dan juga faktor lingkungan seperti budaya etis dalam organisasi. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah faktor internal yang memengaruhi perilaku etis pemeriksa, salah satunya *equity sensitivity*. Menurut Huseman (1987), *equity sensitivity* ialah suatu variabel kepribadian dimana seorang individu menanggapi situasi ketika mereka merasa adil (*equity*) atau tidak adil (*inequity*). Fitriani (2024) berpendapat bahwa perbedaan kepribadian dalam konsep ini memiliki dampak pada perilaku etis tidaknya seorang akuntan. Selain itu, menurut Rawass (2009) *ethical sensitivity* juga merupakan dimensi penting yang memengaruhi pengambilan keputusan pemeriksa dalam berperilaku etis karena *ethical sensitivity* mencerminkan kemampuan individu untuk mengenali dan merespons situasi yang melibatkan dilema moral atau konflik etika.

Hasil penelitian terdahulu masih belum konsisten, penelitian yang dilakukan oleh Septiari (2023) pada auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Bali menunjukkan bahwa *equity sensitivity* tidak berpengaruh terhadap perilaku etis auditor, sedangkan *ethical sensitivity* berpengaruh. Objek penelitian terdahulu terdiri dari mahasiswa akuntansi dan auditor pada KAP. Dalam penelitian ini dilakukan pada pemeriksa BPK sebagai satu-satunya lembaga audit eksternal pemerintahan Indonesia yang juga memiliki nilai dasar organisasi termaktub dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang akan digunakan untuk mengukur perilaku etis dalam penelitian ini yaitu: integritas, independensi, dan profesionalisme. Dimensi dari ketiga nilai etika tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai pengukuran berperilaku etis tidaknya pemeriksa BPK RI.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui secara parsial pengaruh *equity sensitivity* terhadap perilaku etis pemeriksa pada BPK RI; (2) mengetahui secara parsial pengaruh *ethical sensitivity* terhadap perilaku etis pemeriksa pada BPK RI; dan (3) mengetahui pengaruh *equity sensitivity* dan *ethical sensitivity* secara simultan terhadap perilaku etis pemeriksa pada BPK RI.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Sanggarwangi (2021) perilaku etis merujuk pada perbuatan yang sejalan dengan aturan, pedoman, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat. Dijelaskan lebih spesifik menurut Halimatusyadiah (2024) perilaku etis auditor merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu sesuai dengan aturan baku atau kode etik profesi auditor pemerintah. Indikator dalam penelitian ini diambil berdasarkan dimensi kode etik pemeriksa BPK RI yang juga sebagai nilai dasar organisasi termaktub dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan Peraturan BPK Nomor 1 tahun

2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK memiliki nilai dasar organisasi yang juga sebagai kode etik pemeriksa yakni:

1. Independensi

Menurut Sukriah (2009), independensi auditor merupakan kedaulatan atau kemandirian posisi auditor baik perilaku maupun tindakannya berkaitan dengan pihak dalam proses pelaksanaan audit. Indikator independensi yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sukriah adalah sebagai berikut:

- 1) Independensi pelaksanaan audit yang bebas dari intervensi pihak lain.
- 2) Independensi pelaporan audit yang bebas dari intervensi pihak lain.

2. Integritas

Menurut Arens et al., (2017:132) integritas berarti auditor menjunjung tinggi kejujuran dan konsistensi moral dalam melaksanakan seluruh rangkaian proses audit guna memelihara kepercayaan publik berdasarkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit. Indikator integritas yang digunakan dalam penelitian ini menurut Mulyadi (2014) ialah:

- 1) Kejujuran auditor dalam menyampaikan informasi sesuai fakta.
- 2) Keberanian auditor dalam menghadapi tantangan dalam proses audit.

3. Profesionalisme

Menurut Arens et al., (2017) profesionalisme ialah perilaku untuk mengedepankan tindakan yang lebih dari sekadar menyelesaikan beban tugas yang ada. Indikator profesionalisme pemeriksa dalam penelitian ini merujuk pada teori Arens (2017), yakni:

- 1) Pengabdian pada profesi tercermin melalui dedikasi dengan memanfaatkan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki.
- 2) Hubungan dengan sesama profesi sebagai landasan utama dalam melaksanakan pekerjaan.

Menurut Ustadi dan Utami (2005) *equity sensitivity* ialah sebuah pandangan seorang individu pada keadilan yang diperoleh dengan membandingkan input dan hasil yang diterima individu tersebut dengan yang diterima oleh orang lain. Reis dan Mitra (1998) memberikan anjuran untuk menggunakan variabel *equity sensitivity* guna mengukur perilaku etis seseorang. Indikator untuk mengukur *equity sensitivity* menurut Huseman (1987) adalah sebagai berikut:

1) *Benevolent*

Persepsi seseorang terhadap keadilan yang menunjukkan sikap lebih suka memberi daripada menerima yakni memiliki kecenderungan berperilaku etis karena sifatnya yang tidak egois. Dengan kata lain *input* yang diberikan individu tersebut lebih besar daripada *outcome* yang diterimanya.

2) *Entitled*

Pandangan seseorang terhadap keadilan yang cenderung lebih suka menerima sesuatu lebih besar (*outcome*) dibandingkan dengan *input* atau apa yang individu tersebut berikan.

Menurut Anggriati dan Muslichah (2019) *ethical sensitivity* ialah kemampuan seseorang dengan mudah memahami lebih dalam terkait nilai moral dan etika ketika hendak membuat suatu keputusan yang memengaruhi perilaku etis. Indikator yang digunakan untuk mengukur sensitivitas etis pemeriksa BPK RI dalam penelitian ini menurut Falah (2006) adalah sebagai berikut:

- 1) Kegagalan akuntan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu.
- 2) Pemanfaatan jam kerja untuk keperluan pribadi.

3) Subordinasi penilaian akuntan terhadap prinsip-prinsip akuntansi.

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan satu atau lebih variabel yang diteliti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1	Analisis Pengaruh <i>Equity Sensitivity</i> dan <i>Ethical Sensitivity</i> terhadap perilaku Etis Auditor	Ruth Novita Dani Kusuma dan A. Totok Budisantosa (2017)	Kuantitatif dengan sampel yang digunakan sebanyak 58 responden yaitu auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya	<i>Equity sensitivity</i> dan <i>ethical sensitivity</i> berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor
Perbedaan: - Kode etik yang digunakan untuk mengukur perilaku etis dalam penelitian terdahulu yakni Kode Etik Akuntan Publik, sedangkan indikator pengukuran variabel dependen pada penelitian ini menggunakan nilai dasar organisasi yang juga merupakan kode etik pemeriksa BPK: Integritas, Independensi, Profesionalisme. - Variabel equity sensitivity diukur menggunakan <i>Equity Sensitivity Instrument (ESI)</i> sedangkan pada penelitian ini menggunakan <i>Equity Preference Questionnaire (EPQ)</i> yang telah dimodifikasi. - Kasus pelanggaran etika dan yang menjadi responden pada penelitian ini ialah pemeriksa pada <i>Supreme Audit Institution</i> Pusat.				
2	Pengaruh <i>Moral Reasoning</i> , <i>Ethical Sensitivity</i> , dan Kecerdasan Emosional terhadap Persepsi Etis Mahasiswa dengan Perilaku Belajar sebagai Variabel <i>Moderating</i>	Duwi Rahayu, Septiyan Dewi Kasan, Sigit Hermawan (2019)	Kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner pada 156 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta	<i>Ethical Sensitivity</i> berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa secara simultan dan parsial
Perbedaan: Dalam penelitian terdahulu menguji persepsi etis mahasiswa ketika hendak dihadapkan pada dunia kerja sebagai seorang akuntan. Sedangkan pada penelitian ini menguji apakah <i>ethical sensitivity</i> berpengaruh pada praktisi langsung di lapangan yakni pemeriksa terhadap perilaku etisnya. Disini terdapat perbedaan objek dan lokus penelitian/				
3	Pengaruh <i>Equity Sensitivity</i> , <i>Ethical Sensitivity</i> , <i>Emotional Intelligence</i> , dan Budaya Organisasi	Dhea Aprilia ni Hamidi (2020)	Kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 54 responden dari 14 KAP dengan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS	<i>Equity sensitivity</i> dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor. Sedangkan <i>ethical sensitivity</i> dan <i>emotional intelligence</i> tidak

Terhadap Perilaku Etis Auditor			berpengaruh terhadap perilaku etis auditor.
Perbedaan: - Objek penelitian terdahulu dilakukan pada auditor di KAP sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemeriksa BPK Pusat. - Pengukuran pada variabel perilaku etis dalam penelitian ini berdasarkan nilai dasar organisasi dan SPKN BPK RI Pusat. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan pengukuran yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan berdasarkan pada regulasi yang berada pada KAP.			

Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu didapati unsur kebaharuan dalam penelitian ini yakni dilakukan pada pemeriksa BPK RI Pusat sebagai satu-satunya audit eksternal pemerintahan Indonesia yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan keuangan kementerian maupun lembaga di seluruh Indonesia yang menggunakan anggaran negara dan juga pengukuran berperilaku etis tidaknya pemeriksa ini didasarkan pada nilai dasar organisasi yang juga sebagai kode etik pemeriksa BPK RI.

Hipotesis merupakan jawaban teoritis atas permasalahan penelitian yang belum didasarkan pada hasil observasi empiris. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

- Pengaruh *equity sensitivity* terhadap perilaku etis pemeriksa pada BPK RI Pusat
 H_{a1} : *Equity sensitivity* berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis
 H_{01} : *Equity sensitivity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis
- Pengaruh *ethical sensitivity* terhadap perilaku etis pemeriksa pada BPK RI Pusat
 H_{a2} : *Ethical sensitivity* berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis
 H_{02} : *Ethical sensitivity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis
- Pengaruh *equity sensitivity* dan *ethical sensitivity* terhadap perilaku etis pemeriksa pada BPK RI Pusat
 H_{a3} : *Equity sensitivity* dan *ethical sensitivity* berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis
 H_{03} : *Equity sensitivity* dan *ethical sensitivity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei dimana populasi penelitian merupakan seluruh pejabat fungsional pemeriksa BPK RI Pusat dari berbagai unit pemeriksaan. Berdasarkan data SISDM terbaru Januari 2025 jumlah pemeriksa di BPK RI Pusat sebanyak 2056 orang. Sampel penelitian ini ditentukan berdasarkan 10% dari total populasi yang ada, dilandasi pada teori Gay dan Diehl (1992) serta merupakan rekomendasi oleh Roscoe dalam bukunya "*Research Methods for Business*" (1982:253). Dimana dalam teori oleh Roscoe bahwa ukuran sampel dalam suatu penelitian harus berkisar di antara 30 hingga 500 orang. Oleh karena itu, sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 10% dari 2056 total populasi, yakni sebesar 200 sampel dengan teknik *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yakni data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian menggunakan *google formulir* dengan skala Likert.

Seluruh item pernyataan variabel independen dan dependen dalam penelitian ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan hasil r hitung lebih besar daripada r tabel dan nilai *Cronbach's Alpha*-nya lebih besar dari 0,6 sehingga dikatakan valid dan reliabel. Kemudian teknik pengolahan data yang dilakukan sebagai syarat uji regresi linear berganda adalah uji asumsi klasik dimulai dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dimana hasil nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal. Kemudian hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,10. Hasil uji Glejser nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas. Terakhir, uji linearitas dimana hasil nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka hubungan antara variabel (X) dan (Y) dalam penelitian ini bersifat linear. Setelah dilakukan serangkaian uji asumsi klasik, maka selanjutnya adalah uji hipotesis regresi linear berganda melalui uji t dan uji F .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Variabel *Equity Sensitivity*

Variabel *equity sensitivity* diukur menggunakan 2 indikator dalam 6 butir pernyataan dengan hasil rata-rata sebagai berikut:

Tabel 3. Rata-rata Variabel *Equity Sensitivity*

Item Pernyataan	Mean	
Indikator <i>benevolent</i>	3,23	3,16
	3,39	
	2,87	
Indikator <i>entitled</i>	3,91	3,96
	3,96	
	4,01	
TOTAL	3,56	

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Hasil penyajian data menunjukkan bahwa kedua indikator pengukuran pada variabel ini berada pada kategori baik dengan indikator *benevolent* memiliki total skor sebesar 3,16 yang lebih kecil dari pada indikator *entitled* dengan skor 3,96. Namun, pernyataan pada indikator *entitled* ialah tipe *unfavorable* sehingga mayoritas responden tidak setuju dengan pernyataan yang menggambarkan dirinya *entitled*. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah seseorang yang *benevolent* dibuktikan dengan total rata-rata skor pada variabel ini sebesar 3,56 yang berada pada kategori baik. Hal ini mencerminkan *input* mereka lebih besar dibandingkan *outcome* mereka yang secara umum pola jawaban responden memperlihatkan bahwa mereka memiliki etos kerja yang baik dan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan menghargai keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diperoleh.

Hasil uji t dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut:

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	40.851	6.244	6.543	<.001		
	TOTAL X1	1.064	.222	4.782	<.001	.933	1.072
	TOTAL X2	.013	.222	.005	.955	.933	1.072

a. Dependent Variable: TOTAL Y

Gambar 2. Hasil Uji t

Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan gambar di atas nilai t hitung variabel *equity sensitivity* (X1) sebesar 4.782 dengan t tabel sebesar 1.984 maka t hitung pada variabel *equity sensitivity* (X1) lebih besar dari pada t tabel. Dengan demikian, terdapat pengaruh antara variabel *equity sensitivity* (X1) dengan perilaku etis (Y). Selain itu, pengaruh tidaknya suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Berdasarkan gambar di atas, nilai signifikansi variabel *equity sensitivity* (X1) ialah sebesar <0,001. Maka nilai ini lebih kecil dari signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (Ha1) yang menyatakan bahwa *equity sensitivity* berpengaruh terhadap perilaku etis dapat diterima, sedangkan hipotesis nol (H01) yang menyatakan tidak adanya pengaruh, ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat sensitivitas individu terhadap keadilan yang tergambarkan dalam *equity sensitivity* memegang peran penting dalam mendorong atau menghambat munculnya perilaku etis dalam konteks profesional pemeriksa.

2. Variabel *Ethical Sensitivity*

Variabel *ethical sensitivity* diukur menggunakan 3 indikator dalam 4 butir pernyataan dengan hasil rata-rata sebagai berikut:

Tabel 4. Rata-rata Variabel *Ethical Sensitivity*

Item Pernyataan	Mean	
Indikator kegagalan akuntan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu	3,11	3,11
Indikator pemanfaatan jam kerja untuk keperluan pribadi	3,75	3,75
Indikator subordinasi penilaian akuntan terhadap prinsip-prinsip akuntansi	3,13	3,23
	3,33	
TOTAL	3,33	

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Total skor rata-rata pada variabel *ethical sensitivity* ini sebesar 3,33. Meskipun berada pada kategori baik, namun dua dari tiga indikator memiliki skor yang relatif masih cukup rendah, yakni 3,11 dan 3,23. Hal ini menunjukkan bahwa kepekaan etis responden tidak konsisten dalam semua aspek sehingga diperlukan penguatan nilai-nilai etika profesi secara lebih merata, khususnya dalam hal tanggung jawab terhadap waktu dan keberanian untuk mempertahankan prinsip akuntansi di tengah tekanan.

Selanjutnya pada hasil uji t yang ditunjukkan pada Gambar 2 di atas mengindikasikan bahwa perbandingan nilai antara t hitung variabel *ethical sensitivity* (X2) sebesar 0,057 dengan t tabel sebesar 1.984 maka t hitung pada variabel *ethical sensitivity* (X2) lebih kecil dari pada t tabel. Dengan demikian, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel *ethical sensitivity* (X2) terhadap perilaku etis (Y). Selain itu, pengaruh

tidaknya suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Berdasarkan nilai signifikansi variabel *ethical sensitivity* (X2) sebesar 0,955. Maka nilai ini lebih besar dari signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H02) diterima, sedangkan hipotesis alternatif (Ha2) yang menyatakan adanya pengaruh, ditolak.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh

oleh faktor yang menurut Van der Wal dan Huberts (2008) adalah perbedaan nilai organisasi antara sektor publik dan privat, mengingat bahwa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh *ethical sensitivity* terhadap perilaku etis pemeriksa kebanyakan berasal dari KAP sebagai sektor swasta. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada sektor publik. Sistem pada sektor publik dalam hal ini BPK RI lebih birokratis dan memiliki standar pemeriksaan yang terperinci seperti SPKN juga pengawasan internal yang harus diikuti. Karena semuanya sudah diatur dengan rinci, maka perilaku pegawai pemeriksa lebih dibentuk oleh sistem dan aturan organisasi, bukan hanya oleh nilai pribadi. Jadi, meskipun seorang pemeriksa tidak terlalu tinggi kepekaan etisnya, pemeriksa tersebut tetap bisa bertindak etis karena sistem mendorong atau bahkan memaksa tindakannya ke arah berperilaku etis tersebut. Sedangkan pada sektor swasta, KAP misalnya, aturan bisa jadi lebih fleksibel, tergantung budaya perusahaan, klien, atau manajer. Karyawan seringkali menghadapi dilema etis yang tidak diatur secara tegas dalam standar operasional prosedur. Dalam kondisi seperti itu, keputusan etis sangat bergantung pada nilai pribadi dan kepekaan etis individu, karena tidak ada sistem yang secara otomatis mengarahkan ke satu pilihan benar.

3. Variabel Perilaku Etis

Variabel perilaku etis diukur menggunakan 3 dimensi dengan 6 indikator dalam 15 butir pernyataan dengan hasil rata-rata sebagai berikut:

Tabel 5. Rata-rata Variabel Perilaku Etis

Item Pernyataan	Mean	
Dimensi Independensi		
Independensi pelaksanaan audit	4,60	4,43
	4,40	
Independensi pelaporan audit	4,37	
	4,34	
Dimensi Integritas		
Kejujuran	4,68	4,35
	4,25	
	4,62	
Keberanian	4,24	
	4,10	
	4,22	
Dimensi Profesionalisme		
Pengabdian pada profesi	4,26	3,98
	3,56	
	3,97	
Hubungan dengan sesama profesi	4,09	
	4,03	
TOTAL	4,25	

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Total skor pada variabel perilaku etis ini sebesar 4,25 yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki tingkat perilaku etis yang baik dalam menjalankan tugasnya, mencakup aspek independensi, integritas, dan profesionalisme. Dimensi kejujuran dan independensi pelaksanaan audit memperoleh skor tertinggi, mencerminkan kuatnya komitmen auditor terhadap kebenaran, objektivitas, serta kebebasan dari intervensi dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian, terdapat dua indikator dengan skor yang relatif lebih rendah meskipun masih dalam kategori baik, yaitu pengabdian pada profesi (3,93) dan hubungan dengan sesama profesi (4,06). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan aspek komitmen berkelanjutan terhadap profesi. Oleh karena itu, meskipun secara keseluruhan perilaku etis auditor tergolong baik, upaya penguatan budaya profesional yang mendorong pembelajaran berkelanjutan dan kolaborasi internal antar pemeriksa tetap perlu dilakukan agar nilai-nilai etis dapat semakin mengakar dan merata.

4. Hasil Uji F

Uji F dilakukan guna mengetahui apakah terdapat pengaruh dari kedua variabel independen dalam penelitian ini secara simultan terhadap variabel dependen dengan hasil sebagai berikut:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	930.329	2	465.164	12.180	<.001 ^b
	Residual	3704.421	97	38.190		
	Total	4634.750	99			

a. Dependent Variable: TOTAL Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL X2, TOTAL X1

Gambar 3. Hasil Uji F

Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan gambar di atas, maka didapati bahwa F tabel sebesar 3,0901 untuk N yang berjumlah 100 atau DF 2 sebesar 97. Kemudian jika dilakukan hasil analisis maka, F hitung pada penelitian ini yakni sebesar 12.180 lebih besar dari F tabel yang sebesar 3,0901. Selain itu, jika dilihat dari nilai signifikansi pada tabel 4.17 hasil uji F di atas kurang dari 0,001 maka disimpulkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara kedua variabel independen yakni *equity sensitivity* (X1) dan *ethical sensitivity* (X2) secara simultan atau bersama-sama terhadap perilaku etis (Y). Maka hipotesis alternatif (Ha3) diterima yang mengindikasikan adanya pengaruh kedua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dan hipotesis nol (H03) ditolak. Dengan kata lain, variabel *ethical sensitivity* (X2) mungkin secara individual tidak cukup kuat pengaruhnya, tetapi ikut menyumbang varians atau memperkuat model saat digabungkan. Jadi, secara parsial X2 tidak signifikan, tapi secara simultan, keberadaan X2 membantu menjelaskan hubungan antara X1 dan Y, meskipun kontribusinya kecil.

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil R-Square berfungsi sebagai acuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kedua variabel independen secara simultan terhadap Y dengan hasil sebagai berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 ^a	.406	.394	3.71472

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Gambar 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber: Diolah penulis, 2025

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa nilai R-Square pada penelitian ini sebesar 0,406 yang menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel *equity sensitivity* (X1) dan *ethical sensitivity* (X2) terhadap perilaku etis (Y) adalah 40,6%. Sedangkan sisanya sebesar 59,4% dipengaruhi faktor lain di luar daripada variabel penelitian ini. Dengan demikian, 40,6% variasi dalam perilaku etis pegawai pemeriksa di BPK RI dapat dijelaskan oleh variabel *equity sensitivity* (X1) dan *ethical sensitivity* (X2). Sementara sisa 59,4% variasi dalam perilaku etis dipengaruhi faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor selain daripada variabel dalam penelitian ini memungkinkan untuk berkontribusi terhadap perilaku etis pegawai pemeriksa di BPK RI. Menurut Chin (1998), nilai R-Square dianggap moderat jika lebih dari 0,33 namun kurang dari 0,67. Sehingga R-Square dalam penelitian ini sebesar 0,406 berada di kategori moderat.

6. Persamaan Regresi Linear Berganda

Persamaan pada uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

- Y : variabel dependen (variabel yang diprediksi atau dijelaskan)
a : konstanta (nilai Y saat X₁ dan X₂ bernilai nol)
b₁ dan b₂ : koefisien regresi, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh X₁ dan X₂ terhadap Y secara parsial
X₁ dan X₂ : variabel independen (variabel bebas atau prediktor)
e : error (kesalahan atau selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi)

Berdasarkan nilai *unstandardized* pada hasil uji t Gambar 2 di atas, maka didapatkan persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 40,851 + 1,064 X_1 + 0,013 X_2$$

- Nilai konstanta bernilai positif sebesar 40,851 yang berarti adanya pengaruh positif variabel independen *equity sensitivity* (X1) dan *ethical sensitivity* (Y).
- Nilai koefisien regresi variabel *equity sensitivity* (X1) terhadap perilaku etis (Y) sebesar 1,064 yang berarti jika variabel *equity sensitivity* (X1) mengalami kenaikan satu satuan, maka perilaku etis (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,064 atau 106,4%.
- Nilai koefisien regresi variabel *ethical sensitivity* (X2) terhadap perilaku etis (Y) sebesar 0,013 yang berarti jika variabel *ethical sensitivity* mengalami kenaikan satu satuan, maka perilaku etis (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,013 atau 1,3%.

Setiap kenaikan satu satuan pada variabel *equity sensitivity* (X_1) akan meningkatkan perilaku etis (Y) sebesar 1,064 satuan, dengan asumsi X_2 tetap atau tidak berubah. Karena nilai koefisien ini positif dan signifikan (H_{a1} diterima), maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sensitivitas terhadap keadilan yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula perilaku etisnya. Sedangkan, setiap kenaikan satu satuan pada *ethical sensitivity* (X_2) akan meningkatkan perilaku etis (Y) sebesar 0,013 satuan, jika X_1 tetap. Namun, berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan (H_{a2} ditolak), nilai ini tidak signifikan secara statistik, artinya secara praktis peningkatan *ethical sensitivity* tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap perilaku etis dalam model ini.

SINTESIS PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil hipotesis penelitian, *equity sensitivity* memiliki peranan yang sangat besar yakni 106,4% dalam pengaruhnya terhadap perilaku etis pemeriksa. Dalam hal ini, pihak manajemen perlu memerhatikan faktor yang dapat memengaruhi *equity sensitivity* seorang pemeriksa sebagai bentuk keadilan untuk menghindari perilaku tidak etis, karena kecenderungan kepribadian ini dapat berubah secara dinamis bergantung pada lingkungan kerja dan budaya organisasi seperti yang dikemukakan oleh Huseman (1987). Apabila seseorang yang awalnya *benevolent* yakni rela memberi lebih tanpa menuntut imbalan berada dalam organisasi yang kurang menghargai kontribusinya, ia bisa merasa dimanfaatkan. Dalam jangka panjang, ini dapat menimbulkan perasaan frustrasi atau merasa berhak mendapatkan lebih karena merasa pernah berkorban.

Guna menjawab permasalahan tersebut, pendekatan manajemen sumber daya manusia perlu diterapkan melalui perumusan suatu prosedur organisasi yang mengakomodasi sensitivitas individu terhadap keadilan (*equity*). Penelitian yang dilakukan oleh King dan Miles (1994) telah menemukan hubungan antara kategori pada *equity sensitivity*, yakni *benevolent* dan *entitled* dan elemen inti dari sebuah organisasi yakni kinerja. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sultan (2011) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa individu dengan tipe *benevolent* cenderung akan merasa puas dalam bekerja dan komitmen pada organisasi apabila sistem manajemen kinerjanya transparan dan adil.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu alternatif solusi untuk menjaga dan meningkatkan *equity sensitivity* seorang pemeriksa BPK RI Pusat adalah dengan menyusun prototipe sistem manajemen kinerja dan apresiasi berbasis persepsi keadilan yang mengintegrasikan teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan pegawai untuk melihat secara transparan bagaimana *track record* penghargaan, promosi, dan pembagian beban kerja dilakukan, dengan indikator-indikator berbasis kontribusi nyata dan umpan balik 360 dengan dimensi keadilan dan etika. Teknologi dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses penilaian berbasis algoritma yang objektif dan adil, sehingga didapati pegawai yang *benevolent* maupun *entitled*.

Sistemnya adalah dengan menggunakan *software* berbasis *cloud* yang otomatis merekam dan menganalisis capaian target kerja, termasuk didalamnya penghargaan yang telah diraih dan kontribusi pegawai berdasarkan data input harian/mingguan selama periode tertentu misalnya triwulan sekali. Teknologi ini yang akan menganalisis laporan atau tugas apa yang telah dikerjakan sesuai target, apakah pekerjaan tersebut selesai tepat waktu atau terlambat, dan kualitas *output*-nya dilihat dari *review* dan *feedback* atasan maupun rekan kerja. Hal ini memungkinkan untuk adanya kolaborasi antar sesama profesi dengan *peer review*. Di akhir periode, sistem akan memberikan skoring atas kinerja berdasarkan data yang masuk. Salah satu *software* yang memiliki fungsi ini ialah SAP SuccessFactors.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh El Haddad, Karkoulouian, dan Nehme (2019) menyatakan bahwa sistem umpan balik 360 derajat tidak hanya meningkatkan persepsi keadilan organisasi tetapi juga membantu mempertahankan keadilan tersebut sebagai bagian integral dari budaya organisasi. Maka dari itu, alternatif solusi berikutnya adalah evaluasi penilaian kinerja dengan umpan balik 360 berbasis etika dan prinsip keadilan juga perlu dilakukan dengan pegawai dinilai dari banyak arah termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan diri sendiri. Penilaian tidak hanya terkait dengan hasil *output* kuantitatif semata, tetapi juga menilai apakah pegawai tersebut bertindak jujur, memperlakukan orang lain dengan hormat, semua pegawai mendapatkan kesempatan yang setara, dan instrumen pertanyaan terkait kompetensi etis lainnya. Di akhir periode, sistem akan menggabungkan skor terkait capaian target dan hasil penilaian 360 yang akan mengarah pada di kategori *equity sensitivity* mana pegawai tersebut berada sehingga didapati bentuk pengembangan yang sesuai dengan kategori masing-masing pegawai.

Sebagai langkah lanjutan, pihak manajemen sumber daya manusia dapat mengembangkan prosedur baku yang dirancang untuk memperkuat budaya keadilan dan beretika di lingkungan kerja. Hasil penelitian terdahulu oleh Yılmaz dan Güven (2025) menyatakan bahwa pelatihan etika secara signifikan meningkatkan tingkat sensitivitas etika seorang individu. Alternatif solusi terkait prosedur ini dapat mencakup pelaksanaan pelatihan berkala tentang *ethical decision making* dan pelibatan pejabat fungsional senior dalam forum dilema etis. Hal ini berdasarkan dengan hasil penelitian yang didapati bahwa masih terdapat jawaban beragam dari responden ketika dihadapi dengan skenario kasus tertentu. Maka dari itu, perlu dilakukan forum diskusi terkait dilema etis seperti misalnya dalam kasus skenario pada kuesioner terkait prinsip ketertelusuran (*audit trail*) ini masih terdapat jawaban yang beragam, maka dengan adanya forum ini akan diluruskan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemeriksa ketika dihadapi pada dilema etis sehingga menghindari kesalahan ketika membuat keputusan etis saat memeriksa.

Selain itu, hasil skor rata-rata terendah sebesar 3,56 pada variabel perilaku etis terdapat pada indikator pengabdian pada profesi dengan item pernyataan terkait bacaan jurnal pemeriksaan. Dalam hal ini prosedur baku tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan membaca secara rutin jurnal/berita terkait pemeriksaan dan publikasi profesi lainnya sebagai salah satu capaian target pengembangan diri yang nantinya akan terekam dalam sistem *software* kategori pengembangan diri. Selain itu, guna menghargai pegawai yang telah membaca jurnal rutin tersebut perlu diadakan *sharing session* dari hasil bacaan untuk membahas poin-poin penting dalam isi bacaan. Hal lain yang perlu dilakukan ialah meningkatkan akses pemeriksa ke materi bacaan lewat e-ppid atau perpustakaan riset BPK RI.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Perista dan Quintal (2010) menemukan bahwa praktik penghargaan yang adil, termasuk pengakuan terhadap kontribusi individu, memiliki dampak positif terhadap persepsi keadilan dan kepuasan kerja pegawai. Sebaliknya, sistem penghargaan yang tidak mempertimbangkan keadilan dapat menurunkan kepuasan kerja dan meningkatkan ketidakpuasan. Maka dari itu, alternatif solusi berikutnya adalah diperlukan penghargaan atau pengakuan terhadap pegawai dan tidak hanya diberikan berdasarkan angka kinerja (*output* kuantitatif) seperti berapa banyak laporan yang dibuat atau berapa banyak target tercapai. Tapi juga berdasarkan perilaku etis, seperti kejujuran, tanggung jawab, berani mengatakan yang benar meskipun ada tantangan berat, dan setia pada nilai organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan misalnya sistem pemungutan suara dari rekan kerja dan atasan tentang

siapa yang paling menjaga integritasnya atau dilihat dari hasil penilaian 360 maupun mengangkat kisah nyata pegawai yang berani menolak perbuatan yang tidak etis, lalu diberi penghargaan terbuka. Prosedur pelatihan dan penghargaan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas etis pegawai, tetapi juga menanamkan nilai humanistik dalam prosesnya, yakni memperlakukan pegawai sebagai manusia yang memiliki rasa keadilan, harga diri, dan kebutuhan untuk diakui secara adil.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan membuktikan bahwa adanya pengaruh antara variabel *equity sensitivity* (X1) dengan perilaku etis (Y) berarti Ha1 diterima sedangkan H01 ditolak. Sedangkan, variabel *ethical sensitivity* (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku etis (Y) yang berarti Ha2 ditolak, sedangkan H02 diterima. Kemudian terdapat pengaruh secara simultan antara variabel *equity sensitivity* (X1) dan *ethical sensitivity* (X2) terhadap perilaku etis (Y) berarti Ha3 diterima dan H03 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel *equity sensitivity* (X1) dan *ethical sensitivity* (X2) terhadap perilaku etis (Y) sebesar 40,6%, sementara 59,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang diteliti. Secara khusus, *equity sensitivity* (X1) memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perilaku etis, dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,064 atau 106,4%, jauh lebih besar dibandingkan *ethical sensitivity* (X2) yang hanya sebesar 0,013 atau 1,3% dan tidak signifikan secara statistik. Selain itu, hasil rata-rata indikator variabel independen menunjukkan bahwa semua indikator berada dalam kategori baik, dan indikator *benevolent* dari variabel X1 menjadi yang paling berpengaruh terhadap perilaku etis pemeriksa. Dengan skor rata-rata tertinggi sebesar 3,56 dan berpengaruh terbesar dalam model penelitian ini, *equity sensitivity* (X1) menjadi aspek penting yang perlu dijaga dan ditingkatkan dalam rangka memperkuat perilaku etis pemeriksa di BPK RI.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *equity sensitivity* berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis pemeriksa BPK RI, dengan kecenderungan kepribadian yang dapat berubah seiring dinamika organisasi. Guna mengimplementasikan strategi perbaikan secara efektif, diperlukan pra-kondisi seperti kesiapan struktural, kultural, dan teknologi, termasuk sistem informasi yang mendukung penilaian kinerja adil dan transparan, budaya keterbukaan, pelatihan etika, forum diskusi dilema etis, serta sistem penghargaan berbasis kinerja dan nilai etika yang didukung pimpinan. Seluruh upaya ini harus didukung regulasi internal yang jelas, evaluasi berkelanjutan, dan pelibatan aktif seluruh elemen organisasi agar reformasi etika tidak bersifat simbolis. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa 59,4% perilaku etis dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, sehingga disarankan penelitian selanjutnya mengeksplorasi faktor eksternal seperti sistem sanksi, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Temuan bahwa *ethical sensitivity* tidak berpengaruh signifikan berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga perlu pendalaman lebih lanjut, baik melalui perluasan jumlah responden maupun pendekatan kualitatif seperti wawancara untuk memahami pandangan pemeriksa terhadap isu etis dan persepsi keadilan. Keterbatasan jumlah responden dalam penelitian ini, yaitu hanya 100 dari total populasi, juga menjadi catatan penting, sehingga diusulkan strategi peningkatan partisipasi responden dalam penelitian selanjutnya guna memperkuat validitas temuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arens, A. A. (2017). *Auditing and Assurance Service*. United States: Pearson.
- Gay, L. R. & Diehl, P. L. (1992). *Research Methods for Business and Management*. New York: Macmillan.
- Mulyadi. (2014). *Akuntansi Biaya. Edisi-5*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Roscoe. (1982). “*Research Methods For Business*”, New York. Mc Graw Hill.
- Umar, H., & Purba, R. (2021). *Kualitas Audit dan Deteksi Korupsi*. Medan: Merdeka Kreasi Group.

Jurnal

- Anggriati, L., & Muslichah. (2019). Analisis Pengaruh Penalaran Sensitivitas Etika Terhadap Perlakuan Etis Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset* 2(01):26 35.
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295, 336
- El Haddad, R., Karkoulain, S. dan Nehme, R. (2019), The impact of 360 feedback appraisal system on organizational justice and sustainability: The mediating roles of gender and managerial levels, *International Journal of Organizational Analysis*, Vol. 27 No. 3, pp. 712-728. <https://doi.org/10.1108/IJOA-08-2018-1499>
- Falah, S. (2006). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika. *SNA X Makasar*.
- Fitriani, F., & Sari, V. (2024). Pengaruh Locus Of Control, Equity Sensitivity dan Pengetahuan Etika terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi. Vol 6 No 4 (2024): *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i4.1149>
- Halimatusyaidah. (2024). Pengaruh Perilaku Etis Auditor, Tekanan Waktu Dan Tipe Kepribadian Terhadap Prematur Audit. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*
- Hamidi, D. A. (2020). Pengaruh Equity Sensitivity, Ethical Sensitivity, Emotional Intelligence, dan Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Etis Auditor. <https://repository.bakrie.ac.id/3707/2/00%20cover.pdf>
- Huseman, R. C., Hatfield, J. D., & Miles, E. W. (1987). A New Perspective on Equity Theory: The Equity Sensitivity Construct. *The Academy of Management Review*, 12(2), 222–234. <https://doi.org/10.2307/258531>
- Indonesia Curroption Watch. (2024, Mei). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Retrieved from <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>
- King, W.C., & Miles, E.W. (1994). The measurement of equity sensitivity. *Journal of Occupational and organizational Psychology*, 67, 133-142

- Kumombong, Y. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang Dilakukan oleh Pejabat Daerah. Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Privatum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40907>
- Perista, H., & Quintal, E. (2010). Impact of reward practices on perception of fairness and job satisfaction. *European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions*. Retrieved from <https://www.eurofound.europa.eu/fi/resources/article/2010/impact-reward-practices-perception-fairness-and-job-satisfaction>
- Prasetyawati, dkk. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Turut Serta Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 9475-9491. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Rawass, M., Sidani, Y. & Imad, Z., Mousawer, T. (2009). Gender, age, and ethical sensitivity: the case of Lebanese workers. *Gender in Management: An International Journal*, Vol. 24 Iss 3 pp. 211-227.
- Reiss, M.C. dan Mitra. (1998). The Effect of Individual Difference Factors on The Acceptability of Ethical and Unethical Workplace behaviors. *Journal of Bussiness Ethics* 17.
- Sanggarwangi, A. (2021). Pengaruh Idealisme, Relativisme, Love of Money, dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Persepsi Mahasiswa Atas Perilaku Tidak Etis Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.*, 9(1).
- Sekartaji, F. A., Suhendro, S., & Fajri, R. N. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Etis Mahasiwa Akuntansi: (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Swasta Di Surakarta). Owner : *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 317-330. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.216>
- Septiari, L. P. D. (2023). Pengaruh Equity Sensitivity Dan Ethical Sensitivity Pada Perilaku Etis Auditor Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Bali Dengan Filosofi Tri Kaya Parisudha Sebagai Variabel Moderasi. <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/14535>
- Sukriah. (2009). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang
- Sultan, S. (2011). Equity Sensitivity Predicting Job Satisfaction and Commitment. *JISR management and social sciences & economics* 9(1):1-10
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Ustadi, N. H., & Utami, R. D. (2005). Analisis Perbedaan Faktor-faktor Individual Terhadap Persepsi Perilaku Etis Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 01/No.02/Mei*: 162-180.

Van der Wal, Z. & Huberts, W. J. C. (2008). Value Solidity in Government and Business: Results of an Empirical Study on Public and Private Sector Organizational Values, *The American Review of Public Administration* 38(3): 264–285.

Yilmaz, Ş., & Güven, G. (2025). Does education increase ethical sensitivity a semi-experimental study. *Scientific reports*, 15(1), 1473. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-83121-z>

Internet

Antara News. (2024, Maret). *Achsanul Qosasi didakwa terima suap Rp40 miliar dari kasus BTS Kominfo*. <https://www.antaranews.com/berita/3999348/achsanul-qosasi-didakwa-terima-suap-rp40-miliar-dari-kasus-bts-kominfo>

CNBC. (2022, April). *Bupati Bogor Ade Yasin Jadi Tersangka Gegara Suap Auditor BPK*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428050044-4-335537/bupati-bogor-ade-yasin-jadi-tersangka-gegara-suap-auditor-bpk>

CNBC. (2024, Mei). *Dugaan Aliran Uang SYL Rp12 M ke Auditor BPK Mulai Ditelusuri*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240517130321-4-538996/dugaan-aliran-uang-syl-rp12-m-ke-auditor-bpk-mulai-ditelusuri>

CNN. (2022, Agustus). *KPK Tahan 4 Perwakilan BPK Sulsel Kasus Dugaan Suap, Satu Eks Pimpinan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220818191436-12-836241/kpk-tahan-4-perwakilan-bpk-sulsel-kasus-dugaan-suap-1-eks-pimpinan>.

CNN. (2024, Mei). *Kasus BTS, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Bui*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240521115922-12-1100308/kasus-bts-eks-anggota-bpk-achsanul-qosasi-dituntut-5-tahun-bui>.

CNN. (2023, November). *Daftar 7 Pimpinan dan Anggota BPK yang Terjerat Kasus Korupsi*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231128113742-532-1029932/daftar-7-pimpinan-dan-anggota-bpk-yang-terjerat-kasus-korupsi/2>.

Databoks. (2024, Mei). *Ada 791 Kasus Korupsi di Indonesia pada 2023, Terbanyak di Desa*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/517494e433c6cdf/ada-791-kasus-korupsi-di-indonesia-pada-2023-terbanyak-di-desa>

Detik. (2023, November). *KPK Tetapkan Pj Bupati Sorong Tersangka Suap Pemeriksa BPK*. <https://news.detik.com/berita/d-7035752/kpk-tetapkan-pj-bupati-sorong-tersangka-suap-pemeriksa-bpk>.

Hukum Online. (2024, Mei). *Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kasus-korupsi-menjerat-bpk--butuh-perbaikan-serius-lt664722e789422/>

Indonesia Curroption Watch. (2024, Mei). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Retrieved from <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>

Kompas. (2024, Februari). *Jaksa KPK Sebut Auditor BPK Terima Rp 1,1 M dari Kasus Tukin ESDM*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/29/21272301/jaksa-kpk-sebut-auditor-bpk-terima-rp-11-m-dari-kasus-tukin-esdm?page=all>.

Kompas. (2024, Mei). *Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/17/12334911/pembangunan-tol-mbz-yang-dikorupsi-menyimpan-persoalan-beton-di-bawah?page=all>.

KPK. (2023). *Kasus Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021*. <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/kasus-suap-pengurusan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-bogor-tahun-anggaran-2021>

Media Indonesia. (2022, Maret). *Jaksa Tangkap Dua Auditor BPK Peras RSUD dan 17 Puskesmas di Bekasi Barbuk Rp350 juta*. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/482195/jaksa-tangkap-dua-auditor-bpk-peras-rsud-dan-17-puskesmas-di-bekasi-barbuk-rp350-juta#google_vignette

Tempo. (2023, November). *Jadi Tersangka Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Anggota BPK Achsanul Qosasi Diduga Terima Duit Rp 40 Miliar*. <https://www.tempo.co/ekonomi/jadi-tersangka-dugaan-korupsi-bts-kominfo-anggota-bpk-achsanul-qosasi-diduga-terima-duit-rp-40-miliar-125164>

Tempo. (2024, Maret). *Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor*. <https://www.tempo.co/hukum/kasus-suap-audit-di-sorong-kpk-limpahkan-berkas-perkara-tiga-pejabat-bpk-ke-pengadilan-tipikor-75284>

Transparency International Indonesia. (2024, Januari). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023*. Retrieved from <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>

TVRI. (2022, September). *Auditor BPK Pemeris Puskesmas-RSUD di Bekasi Dituntut 5 Tahun Bui*. <https://hukum.tvrinews.com/berita/tncp79t-auditor-bpk-pemeris-puskesmas-rsud-di-bekasi-dituntut-5-tahun-bui>

Peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Dokumen lain-lain

Data Jumlah Pemeriksa Ahli Pertama, Muda, Madya, Utama di BPK Pusat dari SISDM BPK RI Pusat 2025

